



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. SUSANTI
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERZALDI ROSMAN
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2019

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

ERZALDI ROSMAN

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA,**



**Dra. SUSANTI, M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650713 199203 2 002**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

(1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Definisi Operasional (5)
1	Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga	Persentase Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga	0.82 %	Persentase Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang dimaksud adalah Jumlah Pengembangan I.R. Pada kondisi akhir tahun RPJMD sebesar 1,98 I.R dengan rumusan Jumlah Pelaku IR dibagi Jumlah Perempuan Produktif dikali 100
2	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PPRG	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	28.12%	Persentase OPD yang melaksanakan (mengimplementasikan) PPRG pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 46,875% (15 OPD dari 32 OPD) dengan rumusan Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dibagi dengan jumlah seluruh OPD dikali dengan 100
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan	100 %	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan, dengan rumusan jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus kekerasan di kali 100 persen. Kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 100 Persen
4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga	0.62 %	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga/organisasi adalah perempuan pengambilan keputusan pada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif dan organisasi perempuan. kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 2,31% dengan rumusan Jumlah perempuan pengambil keputusan pada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dibagi dengan jumlah Perempuan yang bekerja di lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif dikali dengan 100
5	Meningkatnya Capaian pemenuhan akan hak-hak anak	Persentase Capaian Kab/Kota Layak Anak	28.57%	Persentase Jumlah capaian Kabupaten/Kota layak Anak pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 6 Kabupaten/Kota dengan rumusan Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kabupaten/Kota Layak Anak dibagi dengan jumlah total Kabupaten/Kota dikali dengan 100

	Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya Keluarga Berkualitas	Persentase Tingkat Kesertaan ber KB	68,90%	Persentase Kesertaan ber KB merupakan angka CPR (contraceptive Prevalence Rate) atau angka tingkat kesertaan ber KB. Pada kondisi akhir tahun RPJMD target dari Kesertaan ber KB adalah sebesar 71 % dengan rumusan Jumlah Peserta KB Aktif/ Jumlah PUS (15-49 tahun) x 100
		Persentase UKP di bawah 20 tahun	0,91%	Persentase UKP (Usia Kawin Pertama) dibawah 20 tahun merupakan jumlah perempuan yang melakukan perkawinan dini. Pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah target penurunan sebesar 0.79 dari data awal sebesar 0.99 di 2017 dengan kata lain rumusannya adalah Jumlah perempuan yang menikah di bawa 20 tahun/ Jumlah seluruh perkawinan dikali dengan 100
6	Meningkatnya daya guna database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan	Persentase Database/Profil Kependudukan yang Termanfaatkan	25%	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang memanfaatkan database/profil kependudukan pada kondisi akhir tahun RPJMD adalah sebesar 53,12% dengan rumusan Jumlah target OPD Provinsi /sektor lain yang memanfaatkan data/profil/dokumen kependudukan Dibagi Jumlah OPD Provinsi (32 OPD) di kali 100
		Persentase Capaian kepemilikan dokumen Kependudukan	73%	Persentase capaian kepemilikan dokumen kependudukan di fokuskan pada persentase kepemilikan akta pernikahan, akta kematian, akte kelahiran kepemilikan KTP-el dan kepemilikan kartu keluarga. Dengan Rumusan Persentase Kepemilikan Akta Pernikahan + Persentase Kepemilikan Akta Kematian + Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran + Persentase Kepemilikan Kepemilikan Ktp-El + Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di bagi 5 * 100%

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAHAN	RP. 2.223.803.250,-	
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	RP. 599.802.000,-	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	RP. 1.208069.000,-	
4	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	RP. 3.066.966.000,-	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	RP. 847.366.350,-	

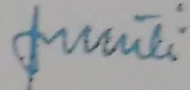
Pangkalpinang, Januari 2019

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650713 1992033 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA,



Dra. SUSANTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650713 199203 2 002